



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang : 2009 - 2010
Masa Sidang : II
Rapat : Ke – 12 (dua belas)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Rabu, 3 Februari 2010
Sifat : Terbuka
Pukul : 14.00 WIB s.d 17.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara : Masukan terhadap RUU tentang Perumahan dan Permukiman
Ketua Rapat : Drs. Yoseph Umarhadi, MSi, MA
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Sesmen Kementerian Perumahan Rakyat, Dirjen Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum, Ketua APERSI, DPP REI, IAI,
IAP, dan MP3I beserta jajaran terkait.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 14.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda rapat kerja hari ini adalah untuk memperoleh masukan terhadap penyusunan draft awal RUU tentang Perumahan dan Permukiman.
3. Ketua mempersilakan Sesmen Kementerian Perumahan Rakyat untuk memperkenalkan pihak-pihak yang hadir dilanjutkan dengan paparan dan masukan terhadap RUU tentang Perumahan dan Permukiman.
4. Ketua mempersilakan anggota Komisi V untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan.

II. KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Sesmen Kementerian Perumahan Rakyat, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Direksi Perumnas, Direksi BTN, Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (APERSI), DPP Real Estate Indonesia (REI), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Perencana (IAP), Masyarakat Perduli Perumahan dan Permukiman Indonesia (MP3I), atas masukan dan saran yang diberikan berkaitan dengan pembahasan Revisi UU Nomer 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.

2. Komisi V DPR RI mencatat berbagai masukan dari Sesmen Kementerian Perumahan Rakyat, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Direksi Perumnas, Direksi BTN, Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (APERSI), DPP Real Estate Indonesia (REI), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Perencana (IAP), Masyarakat Perduli Perumahan dan Permukiman Indonesia (MP3I), terkait Revisi UU Nomer 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman antara lain sebagai berikut:
 - a. Perlunya kejelasan peranan, wewenang dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perumahan dan permukiman.
 - b. Peningkatan sumber-sumber Pembiayaan Perumahan dan Permukiman khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan tidak tetap.
 - c. Peningkatan substansi perumahan dan permukiman sehingga tidak sebatas perumahan dan permukiman formal saja tetapi juga mencakup perumahan Swadaya
 - d. Diperlukan porsi lebih besar bagi Pemerintah Daerah sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam mendorong dan mengembangkan perumahan dan permukiman di daerahnya.
 - e. Diperlukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - f. Perlunya terobosan bagi percepatan proses perijinan perumahan dan permukiman.
 - g. Pentingnya perencanaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
 - h. Penyediaan perumahan layak yang terjangkau harus dijadikan tujuan utama pembangunan perumahan dan permukiman.
 - i. Peningkatan peran swasta dan masyarakat.
 - j. Perlunya kebijakan yang terintegrasi dan sinergis dalam mengurangi backlog perumahan dan permukiman Nasional antara lain dengan mengoptimalkan sisi *supply*.
 - k. Usulan untuk menyatukan revisi UU Perumahan dan Permukiman serta revisi UU Rumah Susun.
 - l. Usulan untuk memberdayakan tabungan perumahan bagi pegawai dimana "pemberi kerja" dan "pegawai" sama-sama berkewajiban dalam menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kredit perumahan.
 - m. Diperlukan adanya pengaturan yang lebih kompetitif atas kepemilikan properti oleh orang asing.
 - n. Perlunya dukungan bagi reposisi Perumnas sebagai *pelaku utama* dalam penyedia perumahan dan permukiman di Indonesia (*National Housing and Urban Development Corporation*).
 - o. Perlunya dukungan pembiayaan/dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan.
 - p. Benchmark dengan undang-undang perumahan di negara lain terutama mengenai status tanah.
 - q. Penguatan Kelembagaan di bidang Perumahan dan Permukiman
 - r. Perlunya langkah-langkah preservasi terhadap nilai-nilai arsitek tradisional dan budaya bangsa.
 - s. Perlunya adanya terobosan di bidang penyediaan perumahan dan permukiman terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
 - t. Mekanisme Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan perumahan dan permukiman.
 - u. Perlu adanya mekanisme subsidi silang antar perumahan mewah dengan perumahan sederhana.
 - v. Perlu dikaji kebutuhan mekanisme penetapan harga tanah secara nasional.
 - w. Perlu keberadaan institusi yang berfungsi sebagai *Land Banking*.
 - x. Dan Lain-Lain.

3. Komisi V DPR RI mengharapkan agar Sesmen Kementerian Perumahan Rakyat, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Direksi Perumnas, Direksi BTN, Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (APERSI), DPP Real Estate Indonesia (REI), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Perencana (IAP), Masyarakat Perduli Perumahan dan Permukiman Indonesia (MP3I), dapat mengambil peranan lebih besar dan bekerjasama lebih lanjut dengan memberi kajian yang lebih mendalam atas substansi yang diperlukan secara tertulis dalam bentuk matriks kepada Komisi V DPR RI sebagai bagian dari pemikiran-pemikiran strategis dalam upaya penyempurnaan serta pembahasan RUU Perumahan dan Permukiman.

Catatan:

- Mengusulkan diadakan RDP untuk mendapatkan masukan dari Kementerian BUMN, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Asosiasi Perbankan Nasional, Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka meminta masukan lebih lanjut terkait penyempurnaan revisi UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
- Diharapkan para pemangku kepentingan yang ada saat ini dapat membuat tim kerja bersama guna menyempurnakan draft Naskah Akademik dan Draft RUU.
- Diharapkan para pemangku kepentingan dapat melakukan sosialisasi kepada kalayak umum terkait pembahasan RUU ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.10 WIB.

Jakarta, 3 Februari 2010

KETUA RAPAT,

ttd

DRS. YOSEPH UMARHADI, MSI, MA

